

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan secara signifikan dalam nilai produksi dan kekayaan ekonomi suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Ini sering diukur dengan perubahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut (Rahmanita & Usman, 2023), pertumbuhan ekonomi ialah naiknya tingkat kapasitas dalam periode berjangka panjang dari pada suatu negara guna mengadakan barang-barang ekonomi untuk masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur prestasi suatu perekonomian, dimana adanya pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan perkembangan fiskal produk suatu barang maupun jasa di suatu negara, misalnya meningkatnya produksi barang industrii, meningkatnya jumlah sektor jasa, infrastruktur, meningkatnya jumlah sekolah dan perkembangan sektor lainnya

Pada era globalisasi ekonomi saat ini integrasi antar negara-negara di dunia menciptakan persaingan ekonomi yang semakin kompetitif. Integrasi yang dilakukan oleh berbagai negara mengakibatkan kaburnya batas-batas antar negara, sehingga keterkaitan ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Integrasi dilakukan tidak hanya perekonomian saja melainkan dalam bentuk kerja sama antar negara, seperti sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, serta teknologi. Negara-negara kawasan Asia Tenggara melakukan kerjasama regional dengan membentuk *Association of South East Asia Nation* (ASEAN) untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan sosial-budaya (Fathoni, Musadieg, & Supriono, 2017). Tujuannya adalah untuk mencapai

tingkat kegunaan yang paling optimal yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya tingkat kesejahteraan yang sama di antara negara-negara anggota (Ferdiansyah, 2016).

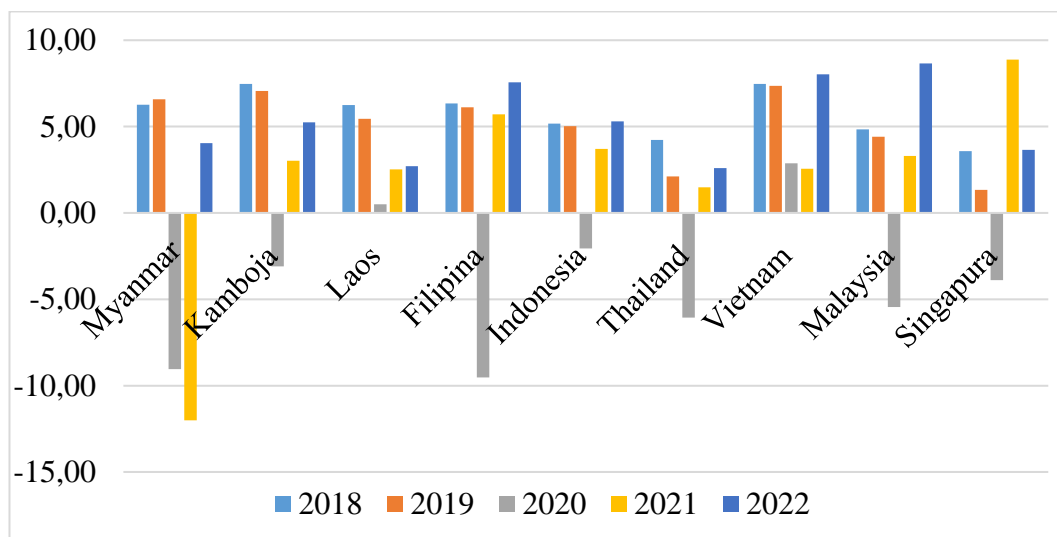
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat berkontribusi pada kesejahteraan negara dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memberikan dukungan terhadap program-program pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui berbagai cara, seperti peningkatan pendapatan perkapita, akses lebih baik ke pendidikan, perumahan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur.

Menurut Anggeraini dalam Rado & Ratu (2023) pertumbuhan ekonomi adalah proses yang merubah kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju kearah yang lebih baik selama kurun waktu tertentu. Selain itu juga, pertumbuhan ekonomi dapat disebut sebagai suatu proses dalam hal kenaikan kapasitas produksi sebuah perekonomian yang perwujudannya dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kesejahteraan masyarakat juga dapat di ukur dengan indikator seperti tingkat kemiskinan, harapan hidup, dan tingkat kebahagiaan. Hubungan antar pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan negara, dan kesejahteraan masyarakat adalah saling terkait. Sebuah negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif cenderung memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, terutama jika pertumbuhan tersebut bersifat inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan ekonomi yang bijak dapat membantu mengarahkan pertumbuhan ekonomi menuju pencapaian kesejahteraan yang lebih baik. Pengaturan dan kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan yang adil, melibatkan masyarakat

dalam proses ekonomi, dan melindungi lingkungan dapat menjadi faktor penting dalam mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi bukan hanya tentang peningkatan statistik ekonomi semata, tetapi juga harus membawa dampak positif pada kesejahteraan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonomi dan keberhasilan suatu negara dalam jangka panjang. Tidak semua negara bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sebagaimana tujuan yang di harapkan. Ada beberapa faktor pendorong dan penghambat bagi suatu negara dalam mencapai pertumbuhan ekonominya. Begitu sebaliknya, jika negara yang tidak mampu meminimalkan faktor penghambat maka akan sulit untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Pramasty & Rosinta, 2015). Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan ekonomi di sembilan negara ASEAN dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2018 - 2022 sebagai berikut :



Sumber: *World Bank, 2024*

**Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sembilan Negara ASEAN Tahun 2018-2022 (Persen)**

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara mengalami penurunan pada tahun 2020 yang diakibatkan dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi ditahun 2019 sembilan negara ASEAN adalah Vietnam dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,36 % dan kemudian menurun menjadi 2,87 % di tahun 2020 dan negara-negara lainnya juga mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 namun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di Asia Tenggara mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Negara singapura menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di tahun 2021 sebesar 8,88%, hal ini dipicu oleh pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura, namun di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Singapura mengalami penurunan sebesar 3,65 %, penurunan tersebut akibat dari kebijakan moneter global yang dimana Bank sentral di banyak negara, termasuk Amerika Serikat, menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang mempengaruhi perekonomian singapura. Kebijakan moneter yang lebih ketat ini berdampak pada aliran modal dan investasi di Singapura, dan Myanmar menjadi salah satu negara yang mengalami penurunan signifikan di tahun 2021 sebesar -12,02 % penurunan tersebut di akibatkan konflik suku dan agama di Myanmar. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi di sembilan negara ASEAN terus mengalami penguatan di antaranya negara yang meningkat secara signifikan adalah Malaysia, Vietnam, Myanmar.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun berarti kesejahteraan ekonomi negara tersebut meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai negatif berarti tingkat kesejahteraan suatu negara juga menurun (Suhada, et al., 2022). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain faktor produksi yaitu harus mampu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dan penggunaan bahan baku industri dalam negeri semaksimal mungkin, faktor investasi yaitu dengan membuat kebijakan investasi yang tidak rumit dan berpihak pada pasar, faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran harus surplus sehingga mampu meningkatkan cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah, faktor kebijakan moneter dan inflasi yaitu kebijakan terhadap nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga juga harus antisipatif dan dapat diterima pasar, dan faktor keuangan negara yaitu berupa kebijakan fiskal yang konstruktif dan mampu untuk membiayai pengeluaran pemerintah (tidak defisit) (Subandi, 2019). Pada penelitian ini yang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah korupsi.

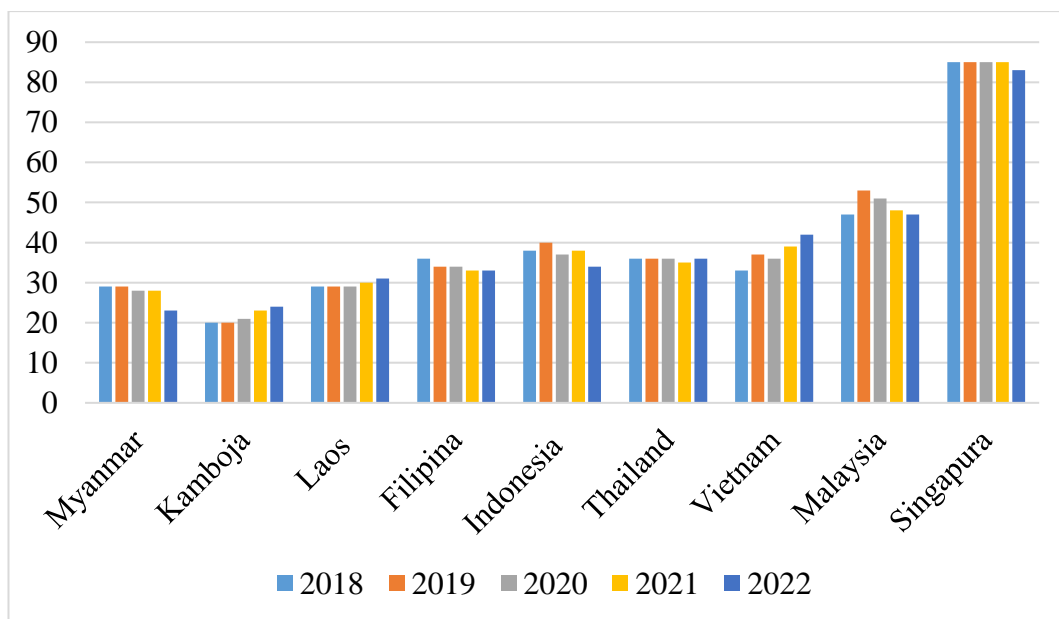
Dampak korupsi pada bidang ekonomi menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan ekonomi di semua negara, termasuk negara-negara sedang berkembang dan maju. Banyak negara mulai mengambil langkah serius dalam mengatasi bahaya korupsi terhadap perekonomian dengan membentuk lembaga atau departemen yang bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan tindakan korupsi tersebut. Para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan. Menurut Blackburn, dkk dalam (Fajar & Azhar, 2018) menyatakan korupsi mengganggu aktifitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian.

Korupsi merupakan suatu permasalahan yang banyak di hadapi oleh berbagai negara di dunia, lebih tepatnya negara-negara yang sedang berkembang. Lemahnya birokrasi dan lembaga penegakan hukum dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi di banyak negara (Irfan & Aimon, 2020). Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan memiliki pengaruh dalam pembangunan serta kesejahteraan negara-negara di kawasan ASEAN. Penyalahgunaan jabatan publik oleh politik yang lebih tinggi juga otoritas sipil untuk memperoleh kekayaan nasional telah diambil alih tempat di dunia dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat (Farooq, Shahbaz, Arouri, & Teulon, 2013). Korupsi diibaratkan sebagai masalah global yang melibatkan proses memperoleh kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh secara tidak sah dengan mengorbankan kepentingan publik untuk keuntungan swasta (Oni & Awe, 2012).

Menurut *World Bank* dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) korupsi merupakan praktek yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, sering kali melalui penyuapan, pemerasan, atau manipulasi sistem. Tidak hanya lembaga eksekutif tersandung kasus korupsi, yang dikelilinginya memiliki kesempatan sebagai pengelola anggaran pemerintah, bahkan legislaif dan yudikatif yang memiliki peran untuk mengawasi dan mengadili eksekutif ikut terjerumus dalam korupsi itu sendiri Klitgard dalam (Irfan & Aimon, 2020).

Tingkat korupsi di negara-negara dapat diukur dengan menggunakan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang di keluarkan oleh *Transparency International* (TI). TI adalah organisasi non-pemerintah berskala internasional yang berfokus pada

pemberantasan korupsi. Salah satu bentuk hasil kerjanya adalah dengan mempublikasikan secara tahunan terkait hasil survei yang dikenal IPK. Dengan survei dapat mengurutkan 180 negara berdasarkan tingkat persepsi masyarakat mengenai korupsi yang terjadi pada jabatan publik dan politik. IPK menggunakan skala 0-100 yang dimana skala 0 (korupsi yang tinggi) dan skala 100 (korupsi yang rendah) (Hazmi, 2024). Oleh karena itu, untuk mengetahui indikator IPK di sembilan negara ASEAN dalam 5 tahun terakhir 2018-2022 sebagai berikut :



Sumber : *Transparency International 2024*

**Gambar 1.2 Indeks Persepsi Korupsi Sembilan Negara ASEAN Tahun 2018-2022 (Skor)**

Berdasarkan Gambar 1.2 diatas menunjukkan indeks persepsi korupsi sembilan negara ASEAN tahun 2018-2022. Dari grafik tersebut dapat terlihat bahwa enam dari sembilan negara ASEAN perlu melakukan pembenahan dalam pemberantasan tindak korupsi. Hanya negara Singapura yang memiliki skor IPK tertinggi se ASEAN selama periode penelitian, pada negara Singapura mendapatkan skor IPK dengan rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 84,6 yang menandakan bahwa di negara tersebut bersih korupsi, hal ini dipicu dikarenakan

negara tersebut memiliki institusi yang kuat, supremasi hukum dan tingkat pembangunan yang tinggi (*Transparency International*, 2019). Negara dengan korupsi sedang yaitu Filipina dengan skor IPK rata-rata 34, Thailand dengan skor IPK rata-rata 35,8, Indonesia dan Vietnam dengan skor IPK rata-rata 37,4 serta Malaysia dengan skor IPK rata-rata 49,2. Negara sangat korup yaitu Myanmar dengan skor IPK rata-rata 27,4, Kamboja mendapatkan skor IPK rata-rata 21,6 dan Laos mendapatkan skor IPK dengan rata-rata 29,6 artinya banyak pejabat publik yang melakukan korupsi di dalam negara ini.

Mengacu pada data yang dirilis oleh *Transparency Internasional* (TI), Myanmar mendapatkan peringkat 157 dan Kamboja mendapatkan peringkat 150 dunia pada tahun 2022. Penyebab rendahnya IPK kedua negara tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Kedua negara ini tidak memiliki infrastruktur kelembagaan dasar yang memadai, seperti mekanisme administrasi dan supremasi hukum yang mendukung sistem berintegritas. Selain itu, penindasan terhadap warga yang berbicara menentang korupsi juga merupakan faktor yang signifikan dalam tingginya tingkat korupsi. Institusi yang lemah di kedua negara ini semakin memperburuk situasi, karena kurangnya pengawasan dan akuntabilitas yang efektif memungkinkan korupsi berkembang tanpa konsekuensi yang berarti.

Menurut Andrews & Htun (2017) praktik korupsi di negara Myanmar lebih banyak terjadi di sektor publik dibandingkan dengan sektor swasta, hal ini terjadi karena dominasi militer dan junta militer yang terjadi di negara Myanmar. Sedangkan di Indonesia, menurut data yang dikeluarkan oleh KPK tahun 2024. Korupsi di Indonesia lebih banyak dilakukan oleh swasta sebanyak 430 kasus dari total kasus 1.682 sepanjang tahun 2004-2023 yang mana didominasi oleh proyek



fiktif yang berupa pengadaan proyek yang tidak pernah maupun memanipulasi nilai proyek. Hal ini mengindikasikan bahwa lembaga-lembaga publik di negara-negara ASEAN masih kekurangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas, minimnya penegakan undang-undang anti korupsi dan keterlibatan masyarakat sipil yang dibatasi. Hal ini juga membuktikan bahwa semakin rendahnya perolehan skor Indeks Persepsi Korupsi yang diperoleh suatu negara akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Korupsi juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang ada di suatu negara. Jika skor IPK naik mendekati 100 maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan meningkat dan bergerak kearah yang cenderung akan menguntungkan negara-negara di Asia Tenggara, begitu juga sebaliknya, jika skor IPK turun mendekati 0 maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan turun dan bergerak kearah yang cenderung akan menguntungkan negara-negara di Asia Tenggara. Dampak korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dapat mengurangi anggaran negara yang akan berdampak terhadap berkurangnya kemampuan negara untuk mereduksi korupsi dan menurunkan besarnya pengeluaran pemerintah, terutama dibidang jaminan sosial dan pembayaran kesejahteraan publik (Fajar & Azhar, 2018).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di negara Myanmar, Filipina, Indonesia, dan Malaysia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akan tetapi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut justru meningkat. Namun ini merupakan situasi yang tidak biasa, karena umumnya diharapkan bahwa korupsi akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan membatasi peluang pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Hal ini juga membuktikan bahwa semakin rendahnya

perolehan skor IPK yang diperoleh suatu negara akan beredampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Sementara negara Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, dan Singapore berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di empat negara tersebut.

Todaro & Smith dalam (Ichvani & Sasana, 2019) banyaknya praktik korupsi di negara berkembang merupakan bentuk kegagalan perencanaan pemerintah akibat kualitas institusi yang rendah sehingga kepentingan pribadi lebih didahulukan dari pada kepentingan nasional. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas institusi di negara tersebut, yang mencakup lemahnya sistem hukum, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas publik. Sehingga kepentingan pribadi para pejabat atau elit politik seringkali diberikan prioritas lebih tinggi daripada kepentingan sosial atau kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, dana publik dan sumber daya negara dialihkan atau disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi, seperti menerima suap atau gratifikasi, alih alih digunakan untuk memajukan kepentingan nasional yang seharusnya.

Negara-negara ASEAN seperti Myanmar, Kamboja, dan Laos dikenal memiliki tingkat IPK yang rendah, artinya mencerminkan tingginya kasus korupsi yang mereka hadapi. Di Myanmar, kasus-kasus korupsi sering melibatkan pejabat tinggi pemerintah dan militer, dengan *Anti-Corruption Commission* (ACC) berupaya keras untuk menyelidiki dan menuntut pelaku korupsi meskipun sering terhalang oleh pengaruh politik dan kurangnya sumber daya. Sedangkan pada negara Kamboja, dengan *Anti-Corruption Unit* (ACU), berusaha mengatasi korupsi yang merajalela, terutama yang melibatkan elit politik dan ekonomi, namun lembaga ini sering dikritik karena kurang independen dan transparan dalam

menjalankan tugasnya. Sedangkan pada negara Laos juga menghadapi tantangan besar dalam memberantasan korupsi, dengan *State Inspection and Anti-Corruption Authority* (SIAA) yang terus berjuang melawan praktik korupsi yang meluas diberbagai sektor pemerintahan.

Peran lembaga pemberantasan korupsi di negara-negara ASEAN lainnya menunjukkan variasi dalam efektivitas dan dukungan politik yang mereka terima. Di negara Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara aktif melakukan penyelidikan, penuntutan, dan operasi tangkap tangan terhadap kasus korupsi besar meskipun menghadapi tantangan politik yang signifikan. Malaysia, melalui *Malaysian Anti-Corruption Commission* (MACC), telah menangani beberapa skandal besar seperti 1MDB dan terus berupaya meningkatkan integritas publik. Pada negara Singapura, dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), tetap menjadi contoh terbaik dalam pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN, dengan pendekatan tanpa toleransi dan kampanye pendidikan publik yang efektif. Di Filipina, *Office of the Ombudsman* dan *Sandiganbayan* berperan penting dalam menyelidiki dan menuntut kasus korupsi, serta mengembangkan program pencegahan korupsi. Negara-negara seperti, Thailand, dan Vietnam juga memiliki lembaga yang berkomitmen dalam memerangi korupsi, meskipun masing-masing menghadapi tantangan unik yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mereka. Melalui kerja keras dan upaya berkelanjutan, lembaga-lembaga ini terus berjuang untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi di negara masing-masing.

Seperti kasus yang terjadi pada negara Indonesia yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam skandal pemerasan mengungkap

kelemahan mendasar dalam moralitas dan integritas lembaga penegak hukum di negara Indonesia. Masalah tersebut bukan hanya mencoreng reputasi KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, namun juga menimbulkan pertanyaan yang serius tentang efektivitas dan ketahanan sistem hukum Indonesia dalam menghadapi godaan korupsi didalam tubuhnya sendiri. Ketika pemimpin dari lembaga yang seharusnya menjadi simbol kejujuran dan transparansi terlibat dalam tindakan yang mereka sendiri harusnya perangi, hal ini menciptakan pandangan masyarakat yang penuh keraguan atau ketidakpercayaan terhadap kemampuan lembaga tersebut untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu, dan lebih jauh lagi, kasus tersebut mencerminkan perlunya reformasi mendalam dalam mekanisme pengawasan internal dan eksternal dilembaga hukum, serta penegakan kode etik yang lebih ketat untuk memastikan bahwa mereka yang berada diposisi kekuasaan tidak menyalahgunakan wewenang mereka.

Dengan meningkatnya kasus korupsi, ditemukan bahwa dana publik sering tidak tepat sasaran, seperti kasus korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung di daerah terpencil pada tahun 2022 di Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses internet dan komunikasi di daerah tersebut, sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat lebih mudah terhubung dengan sumber daya informasi, peluang bisnis, dan pasar global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi di berbagai sektor ekonomi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, proyek tersebut diwarnai dengan berbagai penyimpangan, seperti penggelembungan harga BTS 4G, pengadaan fiktif, dan suap kepada pejabat, yang merugikan dana publik. Korupsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk

pembangunan ekonomi justru memperlambat proses tersebut, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan memperkaya sekelompok orang tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Kasus korupsi BTS 4G ini menunjukkan lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan sistem pengadaan di Indonesia, yang mengakibatkan masyarakat di daerah terpencil tidak mendapatkan akses internet dan komunikasi yang memadai. Selain itu, kasus ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. (*sumber* CNBC Indonesia 2022).

Sejauh ini telah banyak penelitian mengenai pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan oleh Grundele & Potrafke (2019); Akman & A.H, (2018); Erum & Hussain (2019); Grundler & Potrafke (2019); Lutfi, Zainuri, & Diartho (2020); Firman & Munim (2022); Haldi (2023) dan Damanik & Saragih (2023) menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Ichvani & Sasana (2019); Nguyen & Duong (2021) dan Nairobi (2021) menunjukkan hasil bahwa korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang berbeda-beda serta fenomena yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN”**, dengan metode Panel *Autoregressive Distributed Lag* (PARDL), dan jumlah observasi 18 tahun yaitu dari tahun 2005-2022 dengan fokus objek penelitian ini adalah 9 negara di kawasan ASEAN yang terdiri atas Myanmar, Kamboja, Laos, Filipina, Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Singapura. Harapan dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan bagi pemerintah negara-negara ASEAN dalam pemberantasan korupsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN dalam jangka pendek dan jangka panjang ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN dalam jangka pendek dan jangka panjang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menggali ilmu sebanyak banyaknya dan dapat di laksanakan di kehidupan nyata serta dapat berbagai ilmu tersebut dengan yang lain.
2. Menambah manfaat atau masukan mengenai perkembangan ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi public untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan dalam perekonomian serta bagaimana penerapannya.
3. Sebagai acuan peneliti lain untuk mengembangkan penelitian yang lebih lanjut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah negara-negara anggota ASEAN hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah khususnya Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN dalam mengambil kebijakan tentang pertumbuhan ekonomi di ASEAN melalui korupsi.
2. Bagi penelitian berikutnya dapat menjadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut lagi, serta bahan acuan menjadi referensi peneliti yang serupa.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi untuk pengembangan dan keterampilan, serta bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi.